

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH 7 DAN
PROFIL SRI MARNYUNI

2.1 Daerah Pemilihan Jawa Tengah 7

Daerah pemilihan atau sering disebut dapil merupakan sebuah unsur penting di dalam membangun mekanisme pemilu. Marcellino (2023) menyatakan dapil sebagai tempat dimana partai politik dan calon anggota legislatif berkontestasi untuk mendapatkan suara pemilih yang akan menjadi bekal untuk duduk di kursi parlemen atau dalam hal ini DPRD Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 276/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan 13 Daerah Pemilihan yang terbagi menjadi Dapil 1-13.

Tabel 2.1
Daftar Persebaran Wilayah Dapil Jawa Tengah 1-13, 2023

Daftar Dapil	Wilayah Dapil
Dapil 1	Kota Semarang
Dapil 2	Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga
Dapil 3	Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak
Dapil 4	Kab. Rembang, Kab. Pati
Dapil 5	Kab. Grobogan, Kab. Blora
Dapil 6	Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen
Dapil 7	Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kota Surakarta
Dapil 8	Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kota Magelang
Dapil 9	Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Temanggung
Dapil 10	Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara, Kab. Kebumen
Dapil 11	Kab. Banyumas, Kab. Cilacap

mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

2.1.1.1 Kondisi Demografi

Kabupaten Klaten mempunyai jumlah penduduk sebesar 1.267.272 penduduk pada tahun 2021. Angka tersebut menunjukkan jumlah penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten memiliki kepadatan penduduk 1933,11 per Km².

Tabel 2.2

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Prambanan	52.970	0,01	4,18	755,07	98,19
Gantiwarno	38.398	0,01	3,03	547,35	99,56
Wedi	51.683	0,00	4,08	736,73	99,36
Bayat	61.755	0,01	4,87	880,30	99,77
Cawas	56.450	0,01	4,45	804,68	97,73
Trucuk	77.636	0,01	6,13	1106,68	101,42
Kalikotes	37.348	0,01	2,95	532,39	100,50
Kebonarum	19.355	0,00	1,53	275,90	97,30
Jogonalan	60.030	0,01	4,74	855,71	99,76
Manisrenggo	43.546	0,01	3,44	620,74	98,14
Karangnongko	36.543	0,01	2,88	520,91	97,95
Ngawen	45.543	0,01	3,59	649,20	100,56
Ceper	64.615	0,00	5,10	921,07	100,05
Pedan	47.184	0,01	3,72	672,60	99,83
Karangdowo	42.741	0,01	3,37	609,26	97,82
Juwiring	57.933	0,00	4,57	825,82	99,56

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Wonosari	62.316	0,00	4,92	888,30	99,25
Delanggu	41.037	0,00	3,24	584,97	99,36
Polanharjo	40.264	0,00	3,18	573,95	97,33
Karanganom	45.485	0,01	3,59	648,38	98,64
Tulung	52.293	0,01	4,13	745,42	99,54
Jatinom	59.333	0,01	4,68	845,78	100,52
Kemalang	38.813	0,01	3,06	553,27	99,04
Klaten Selatan	44.448	0,00	3,51	633,60	98,10
Klaten Tengah	40.297	0,00	3,18	574,42	96,45
Klaten Utara	49.256	0,00	3,89	702,13	97,52
TOTAL	1.267.272	0,01	100,00	1933,11	99,12

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Berdasarkan data BPS Kabupaten Klaten menunjukkan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yakni pada Kecamatan Trucuk dengan jumlah penduduk sebesar 77.636 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit ditempati oleh Kecamatan Kebonarum dengan jumlah penduduk sebesar 19.355 jiwa. Berdasarkan tabel di atas juga ditemukan kepadatan penduduk yang bervariasi dari 26 kecamatan tersebut, yang mana kecamatan dengan kepadatan penduduk paling tinggi ditempati oleh Kecamatan Trucuk dengan angka 1106,68 per Km² dan Kecamatan Kebonarum dengan kepadatan sebesar 275,90 per Km² sebagai wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah. Kabupaten Klaten mempunyai laju pertumbuhan penduduk dalam 1 tahun sebesar 0,01%. Kabupaten Klaten mempunyai rasio jenis kelamin penduduk sebesar 99,12. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin penduduk tertinggi ditunjukkan oleh Kecamatan Trucuk dengan angka sebesar 101,42. Kecamatan dengan rasio jenis kelamin penduduk terendah ditunjukkan oleh Kecamatan Klaten Tengah dengan angka sebesar 96,45.

2.1.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Kabupaten Klaten pada tahun 2022 mempunyai jumlah penduduk miskin sebesar 144.870 jiwa dengan garis kemiskinan Rp458.872/bulan.

Tabel 2.3
Angka Kemiskinan di Kabupaten Klaten, 2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	Indeks Keparahan Kemiskinan (%)
2022	458.872	144.870	12,33	1,86	0,44
2021	436.896	158.830	13,49	1,79	0,38
2020	419.510	151.800	12,89	1,66	0,31

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2022 (diolah)

Berdasarkan data di atas ditemukan adanya peningkatan dan penurunan kemiskinan berdasarkan jumlah penduduk miskin. Angka tersebut menunjukkan pada tahun 2020 terdapat 151.800 jumlah penduduk miskin dengan garis kemiskinan sebesar Rp 419.510/bulan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 158.830 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp 436.896/bulan. Angka tersebut menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dengan jumlah sebesar 144.870 jiwa. Persentase penduduk miskin pada tahun 2022 sebesar 12,33% kemudian pada tahun 2021 sebesar 13,49% dan pada tahun 2020 sebesar 12,89%. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 1,86% kemudian pada tahun 2021 sebesar 1,79% dan pada tahun 2020 sebesar 1,66%. Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 0,44% kemudian pada tahun 2021 sebesar 0,38% dan pada tahun 2020 sebesar 0,31%.

2.1.1.3 Kondisi Politik

Kondisi politik di Kabupaten Klaten dapat dilihat melalui jumlah anggota DPRD Kabupaten Klaten sebanyak 50 orang. Jumlah anggota dewan laki-laki sebanyak 41 orang dan jumlah anggota dewan perempuan sebanyak 9 orang.

Tabel 2.4

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten, 2020

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	14	5	19
Partai Golongan Karya (Golkar)	6	1	7
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	-	5
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4	1	5
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	-	4
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	1	4
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	-	2
Partai Demokrat	2	1	3
Partai Nasdem	1	-	1
Kabupaten Klaten	41	9	50

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2020

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan kondisi politik yang terjadi di Kabupaten Klaten melihat berdasarkan jumlah anggota DPRD. Tabel tersebut menunjukkan posisi PDIP dengan jumlah anggota dewan paling banyak yakni sebesar 19 orang. Kedudukan PDIP di Kabupaten Klaten mempunyai posisi yang kuat ditunjukkan dengan adanya kedudukan anggota dewan di Kabupaten Klaten dengan jumlah yang paling banyak. Partai Golkar menjadi partai kuat nomor 2 setelah PDIP. Jumlah anggota dewan yang berasal dari Partai Golkar berjumlah 7 orang. PKS dan Partai Gerindra mempunyai posisi yang setara dengan jumlah anggota dewan 5 orang. PKB dan PAN menjadi partai dengan posisi kuat yang

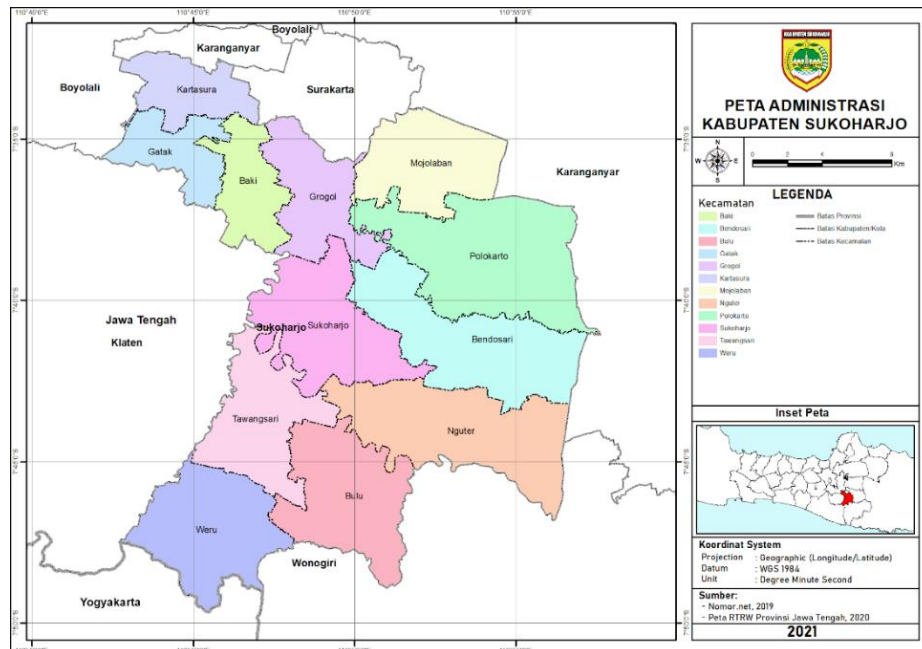
setara berada pada nomor 4 dengan jumlah anggota dewan yakni 4 orang. PPP, Partai Demokrat dan Partai Nasdem menjadi partai yang posisi kedudukannya di daerah Kabupaten Klaten tidak terlalu kuat dengan akumulasi jumlah dewan sebesar 6 orang.

2.1.2 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo termasuk ke dalam salah satu wilayah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 7. Luas Kabupaten Sukoharjo adalah 46.666 Ha atau sekitar 1,435 Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Polokarto dengan luas 6.218 Ha (13,32%) dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kartasura yaitu seluas 1.923 Ha (4,12%).

Letak Kabupaten Sukoharjo bersebelahan langsung dengan Kota Surakarta yang merupakan kawasan perkotaan terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo juga terletak di persimpangan jurusan Semarang, Yogyakarta, Solo dan termasuk di dalam kawasan strategis SUBOSUKA WONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) yang dapat mendukung perkembangan pembangunan, khususnya bidang-bidang potensial di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan orientasi wilayah yang sedemikian rupa, dapat dikatakan Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah yang strategis karena Kabupaten Sukoharjo menjadi jalur lintas baik antar kota maupun antar provinsi.

Gambar 2.2
Peta Wilayah Kabupaten Sukoharjo



Sumber : <https://neededthing.blogspot.com/2021/03/peta-administrasi-kabupaten-sukoharjo.html>

Jika dilihat berdasarkan letak geografis, Kabupaten Sukoharjo terletak di bagian tenggara dari Provinsi Jawa Tengah, adapun daerah Kota/ Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, yakni :

1. Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
2. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY) dan Kabupaten Wonogiri
4. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

2.1.2.1 Kondisi Demografi

Pada tahun 2019 Kabupaten Sukoharjo memiliki jumlah penduduk sebesar 891.912 jiwa, dengan sex rasio sebesar 98,2. Jumlah penduduk Kabupaten

Sukoharjo diperkirakan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 907,587 jiwa berdasarkan hasil SP2020. Kabupaten Sukoharjo diproyeksikan mengalami peningkatan penduduk pada tahun 2021 sebesar 911.603 jiwa dan pada tahun 2022 sebesar 916.627 jiwa berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023.

Tabel 2.5
Banyaknya Penduduk menurut Kecamatan, Persentase dan Sex Rasio di Kabupaten Sukoharjo, 2021

Kecamatan	Jumlah	Persentase (%)	Sex Rasio
Weru	55.253	6,03	100,21
Bulu	35.028	3,82	102,7
Tawang Sari	52.833	5,76	101,32
Sukoharjo	97.610	10,65	101,34
Nguter	53.629	5,85	103,32
Bendosari	62.818	6,85	100,34
Polokarto	84.857	9,26	101,25
Mojolaban	97.459	10,63	100,19
Grogol	128.352	14,00	98,27
Baki	77.096	8,41	101,5
Gatal	55.266	6,03	101,34
Kartasura	116.426	12,71	95,62
2022** ²	916.627	100,00	100,07
2021** ³	911.603	100,00	100,11
2020* ⁴	907.587	100,00	100,15
2019	891.912	100,00	98,2

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2021

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Grogol menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak yakni sebesar 128.352 jiwa

² ** Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)

³ ** Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)

⁴ *Hasil SP2020

dengan angka sex ratio sebesar 98,27. Kecamatan Bulu menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit sebesar 35.028 jiwa.

2.1.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Kabupaten Sukoharjo mempunyai tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwa terdapat 73.840 penduduk miskin pada tahun 2021.

Tabel 2.6
Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo, 2021

Indikator	2019	2020	2021
Penduduk Miskin (jiwa)	63.550	68.890	73.840
Persentase Penduduk Miskin (P0)	7,14	7,68	8,23
Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,87	0,97	0,91
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,14	0,21	0,21
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan)	377.319	393.776	410.273

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2021 (diolah)

BPS memperlihatkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo berjumlah 63.550 jiwa dengan kedalaman kemiskinan sebesar 0,87 dan keparahan kemiskinan 0,14. Pada tahun 2019 menunjukkan garis kemiskinan sebesar Rp 377.319/bulan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 68.890 jiwa dengan kedalaman kemiskinan sebesar 0,97 dan keparahan kemiskinan sebesar 0,91. Pada tahun 2020 menunjukkan garis kemiskinan sebesar Rp 393.776/bulan. Pada tahun 2021 penduduk miskin meningkat sebesar 73.840 jiwa dengan persentase mencapai angka 8,23%. Kedalaman kemiskinan yang terjadi pada tahun 2021 cenderung

mengalami penurunan yakni sebesar 0,91 dan keparahan kemiskinan relatif statis dengan angka 0,21. Garis kemiskinan pada tahun 2021 sebesar Rp 410.273/bulan.

2.1.2.3 Kondisi Politik

Kondisi politik di Kabupaten Sukoharjo melihat berdasarkan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo terdapat 8 partai yang duduk di kursi parlemen Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah anggota dewan sebesar 45 orang.

Tabel 2.7

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukoharjo, 2021

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	14	6	20
Partai Golongan Karya (Golkar)	5	0	5
Partai Amanat Nasional (PAN)	5	0	5
Partai Demokrat	3	2	5
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	0	5
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	2	3
Partai Gerindra	1	0	1
Partai Nasdem	1	0	1
Jumlah	35	10	45

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo, 2021 (diolah)

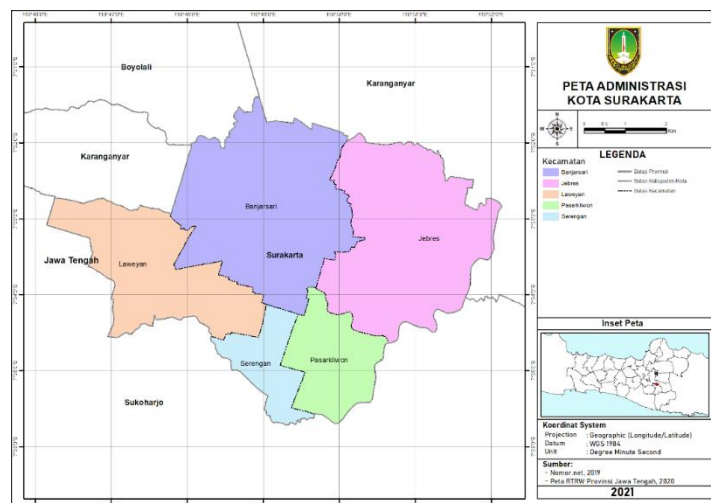
Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan terdapat 4 partai dengan jumlah anggota dewan yang sama yakni sebanyak 5 orang yang masing-masing berasal dari Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat dan PKS. Partai-partai tersebut menunjukkan posisi yang sama kuatnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah anggota dewan yang sama. Partai dengan jumlah anggota dewan paling tinggi diduduki oleh PDIP dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang. Partai yang tidak mempunyai posisi yang terlalu kuat diduduki oleh PKB dengan jumlah anggota dewan sebanyak

3 orang, Gerindra dengan jumlah anggota dewan sebanyak 1 orang dan Nasdem dengan jumlah anggota dewan sebanyak 1 orang.

2.1.3 Gambaran Umum Wilayah Kota Surakarta

Wilayah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 7 selanjutnya adalah Kota Surakarta. Kota Surakarta yang dikenal dengan sebutan 'Kota Solo' terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta termasuk dalam kawasan Solo Raya, sebagai kota utama. Kota Surakarta mempunyai luas wilayah 44.04 Km² terdiri atas 5 kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasarkliwon, Jebres, dan Banjarsari. Kota Surakarta masih sangat lekat dengan kebudayaan Jawa. Kota budaya merupakan julukan dari Kota Surakarta, karena banyak bangunan yang bernilai budaya dan sejarah berdiri di kota ini sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Sisi Timur kota Surakarta dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan Solo.

Gambar 2.3
Peta Wilayah Kota Surakarta



Sumber : <https://neededthing.blogspot.com/2021/07/peta-administrasi-kota-surakarta.html>

Adapun Batas Administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Batas Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
2. Batas Selatan : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar
3. Batas Timur : Kabupaten Sukoharjo
4. Batas Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

2.1.3.1 Kondisi Demografi

Kota Surakarta mempunyai jumlah penduduk sebesar 1.035.774 pada tahun 2018. Data tersebut juga menunjukkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin yang mana secara keseluruhan jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki sebesar 503.544 dan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan sebesar 532.230.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Surakarta, 2018

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Laweyan	43.296	45.958	89.254
Serengan	21.848	23.427	45.275
Pasar Kliwon	37.994	39.033	77.027
Jebres	69.167	74.013	143.180
Banjarsari	79.467	83.684	163.151
Surakarta	251.772	266.115	517.887
Jumlah	503.544	532.230	1.035.774

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2018

Berdasarkan data BPS Kota Surakarta menunjukkan Kecamatan Surakarta menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 517.887 jiwa dan Kecamatan Serengan menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yakni sebesar 45.275. Data tersebut menunjukkan jumlah penduduk perempuan di Kota Surakarta lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki,

jumlah penduduk perempuan sebesar 532.230 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebesar 503.544 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Kecamatan Surakarta adalah Kecamatan Banjarsari dengan jumlah penduduk sebanyak 163.151 jiwa dan selanjutnya Kecamatan Jebres menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga dengan jumlah penduduk sebesar 143.180 jiwa.

2.1.3.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Kota Surakarta pada tahun 2021 mempunyai jumlah penduduk miskin sebesar 48,790 jiwa dengan garis kemiskinan Rp511.216/bulan.

Tabel 2.9
Angka Kemiskinan di Kota Surakarta, 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)	Indeks Keparahan Kemiskinan (%)
2021	511.216	48.790	9,40	1,83	0,54
2020	487.445	47.030	9,03	1,51	0,38
2019	473.516	45.180	8,70	1,60	0,48

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2021 (diolah)

Berdasarkan data di atas ditemukan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta. Angka tersebut menunjukkan pada tahun 2019 terdapat 45.180 jumlah penduduk miskin dengan garis kemiskinan sebesar Rp 473.516/bulan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 47.030 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp 487.445/bulan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan kembali dengan jumlah sebesar 48.790 jiwa. Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 9,40%

kemudian pada tahun 2020 sebesar 9,03% dan pada tahun 2019 sebesar 8,70%. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 1,83% kemudian pada tahun 2020 sebesar 1,51% dan pada tahun 2019 sebesar 1,60%. Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2021 sebesar 0,54% kemudian pada tahun 2020 sebesar 0,38% dan pada tahun 2019 sebesar 0,48%.

2.1.3.3 Kondisi Politik

Kondisi politik di Kabupaten Sukoharjo melihat berdasarkan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo terdapat 6 partai yang duduk di kursi parlemen Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah anggota dewan sebesar 45 orang.

Tabel 2.10

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2023

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	20	10	30
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	0	5
Partai Amanat Nasional (PAN)	3	0	3
Partai Gerindra	3	0	3
Partai Golongan Karya (Golkar)	3	0	3
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	0	1
Jumlah	35	10	45

Sumber : BPS Kota Surakarta, 2023

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan PDIP mendominasi Kota Surakarta dengan jumlah anggota paling banyak sebesar 30 orang dengan jumlah anggota dewan laki-laki sebesar 20 orang dan jumlah anggota dewan perempuan sebesar 10 orang. PKS menjadi partai politik terkuat selanjutnya dengan jumlah anggota dewan sebanyak 5 orang. PAN, Partai Gerindra, dan Partai Golkar

cenderung mempunyai posisi yang sama dengan jumlah anggota dewan sebesar 3 orang. PSI menjadi partai politik paling lemah posisinya dengan jumlah anggota dewan sebesar 1 orang.

2.2 Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, disingkat DPRD Jawa Tengah atau DPRD Jateng, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. DPRD Jawa Tengah beranggotakan 120 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Jawa Tengah terdiri dari 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Jawa Tengah yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 3 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Sri Sutatiek, di Aula Lantai IV Gedung Berlian, Semarang. Komposisi anggota DPRD Jawa Tengah periode 2019-2024 terdiri dari 9 partai politik dimana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 42 kursi. Tugas utama DPRD Jawa Tengah adalah menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi pengawasan, penetapan anggaran belanja, dan penetapan peraturan-peraturan daerah.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. Berdasar itu, DPRD Jawa Tengah yang beranggotakan 120 orang dengan demikian membentuk 5 komisi. Berikut ini daftar komisi dan ketuanya sebagai berikut:

1. Komisi A Bidang Pemerintahan (Ketua: Mohammad Saleh dari Partai Golkar)
2. Komisi B Bidang Perekonomian (Ketua: Sumanto dari PDI-P)
3. Komisi C Bidang Keuangan (Ketua: Asfirla Harisanto dari PDI-P)
4. Komisi D Bidang Pembangunan (Ketua: Alwin Basri dari PDI-P)
5. Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat (Ketua: Abdul Hamid dari PKB)

2.2.1 Visi dan Misi DPRD Provinsi Jawa Tengah

Adapun visi dan misi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Visi

- a. Meningkatkan kualitas fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- b. Menumbuh kembangkan sinergi antar alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Membangun hubungan yang harmonis antar Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah dan Forum Muspida.
- d. Meningkatkan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Meningkatkan komunikasi efektif dengan semua unsur masyarakat guna peningkatan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Misi

Mendukung meningkatnya kualitas sumber daya manusia menuju Provinsi Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari di Tahun 2016 secara berkelanjutan melalui efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta penanganan aspirasi masyarakat.

2.2.2 Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:

- a. Pimpinan
- b. Komisi
- c. Badan Musyawarah
- d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah
- e. Badan Anggaran
- f. Badan Kehormatan
- g. Fraksi

a. Pimpinan

Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua. Pimpinan DPRD Jawa Tengah terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi (dan suara)

terbanyak secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua dan Wakil DPRD Jawa Tengah.

- a. Ketua : H. Bambang Kusriyanto, B.Sc (Fraksi PDIP)
- b. Wakil ketua :
 - 1) H. Sukirman, SS. (Fraksi PKB)
 - 2) Drs. H. Heri Pudyatmoko (Fraksi Gerindra)
 - 3) Ferry Wawan Cahyono, S.Pi, M.Si (Fraksi Golkar)
 - 4) Dipl.-Ing H. Quatly A. Alkatiri (Fraksi PKS)

b. Komisi

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. DPRD Jawa Tengah terdiri dari 5 komisi sebagai berikut:

- a. Komisi A Bidang Pemerintahan
- b. Komisi B Bidang Perekonomian
- c. Komisi C Bidang Keuangan
- d. Komisi D Bidang Pembangunan
- e. Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat

c. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah

Anggota DPRD secara proporsional dan unsur pimpinan DPRD. Jumlah Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dengan komposisi :

1. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.
2. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
3. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan anggota.

d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD menurut perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota Komisi. Jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berjumlah 19 (sembilan belas) anggota. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan masing-masing Fraksi.

e. Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota

Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan berjumlah sebanyak 42 (empat puluh dua).

Badan Anggaran mempunyai tugas:

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
4. Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
5. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan KUA serta Rancangan PPAS yang disampaikan Gubernur; dan

6. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

f. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD. Untuk memilih Anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan. Masa tugas Anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat Anggota Badan Kehormatan yang digantikan.

g. Fraksi

Fraksi memegang peranan penting dalam keberjalanan Dewan karena fraksi diibaratkan merupakan rumah bagi Dewan, berikut daftar Fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
2. Demokrat
3. Gerindra
4. Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Amanat Nasional (PAN)
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

2.2.2.1 Fraksi Partai Amanat Nasional

Dalam menselaraskan kepentingan Anggota Dewan yang beragam, perlu dibentuk fraksi atau kelompok Anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Fraksi memungkinkan Anggota Dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Setiap Anggota Dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik.

Pada Periode 2019-2024, terdapat 6 orang anggota dewan yang berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional yakni

1. Wahyudin Noor Aly (Ketua)
2. Mustolih (Wakil Ketua)
3. Muhammad Yunus (Sekretaris)
4. Amin Makhsun (Anggota)
5. Sri Marnyuni (Anggota)
6. Sofwan Sumadi (Anggota)

2.3 Profil Sri Marnyuni

Dra. Hj. Sri Marnyuni lahir di Karanganyar pada tanggal 21 Juni 1957, merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang menjabat dari periode 2009-

2014, periode 2014-2019, dan periode 2019-2024. Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sri Marnyuni menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B. Menempuh pendidikan di Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan jurusan S1 Pendidikan. Sri Marnyuni merupakan seorang yang aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejak masih menempuh pendidikan di UNS.

Gambar 2.4
Foto diri Sri Marnyuni



Sumber : <https://dprd.jatengprov.go.id/kelengkapan-dewan/komisi/komisi-b/>

Sri Marnyuni mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 7 pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang mencakup wilayah Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Pada Pemilu periode 2009 dan 2014, Sri Marnyuni mewakili Dapil 5 yang mencakup wilayah Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Sri Marnyuni merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Selain menduduki jabatan struktural di DPRD Provinsi Jawa Tengah, ia juga

menduduki jabatan struktural di kepengurusan partai sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di PAN Provinsi Jawa Tengah.

Latar belakang karir Sri Marnyuni dimulai sebagai guru. Sri Marnyuni mengajar di beberapa sekolah seperti SMP Aliyah Muallimin, SMA Al-Islam Solo, dan SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Pada tahun 1999 menjadi titik awal Sri Marnyuni berkarir di dunia politik. Pemilu 1999, Sri Marnyuni terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Klaten dari PAN. PAN mencalonkan Sri Marnyuni sebagai calon legislatif di DPRD Jawa Tengah sejak Pemilu 2004, Sri Marnyuni berhasil mendapatkan suara terbanyak di partainya namun gagal terpilih pada periode tersebut karena mendapatkan nomor urut 3 dan PAN hanya mendapatkan dua kursi. Pemilu 2004 masih menggunakan sistem proporsional daftar tertutup (*closed list*) yang menentukan keterpilihan calon berdasarkan nomor urut. Pada Pemilu 2009 sudah menggunakan sistem proporsional daftar terbuka (*open list*) yang menentukan keterpilihan calon berdasar perolehan suara terbanyak di partainya. Pada Pemilu 2009, Sri Marnyuni mendapatkan nomor urut 1, kemudian pada Pemilu 2014 Sri Marnyuni mendapatkan nomor urut 2, dan pada Pemilu 2019 Sri Marnyuni kembali mendapatkan nomor urut 2. Sri Marnyuni memperoleh suara terbanyak pada tiga pemilu terakhir. Sri Marnyuni tidak mendapatkan nomor urut 1 pada Pemilu 2014 dan 2019 namun dapat terpilih kembali, sehingga Sri Marnyuni mampu mempertahankan dukungan suara pada posisi terbanyak selama 4 periode pemilu.